

**IMPLEMENTASI PROGRAM INFORMASI DAN JARINGAN  
PEMASARAN USAHA MIKRO PADA ERA  
REVOLUSI INDUSTRI 4.0  
( Studi Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kabupaten Jember )**

Angga Pranoto 1610511039 Dr. Ria Angin, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Prodi Ilmu Pemerintahan

Email : [anggapranoto1995@gmail.com](mailto:anggapranoto1995@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Informasi dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro pada Era Revolusi Industri 4.0 di Kabupaten Jember sudah terlaksana dengan baik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian adalah karyawan dinas koperasi dan usaha mikro jember yang bekerja dalam bidang informasi dan jaringan pemasaran. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Informasi Dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro Di Kabupaten Jember telah di Implementasi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Namun, usaha pembinaan terkait program tidak terlaksana secara maksimal. Meski didukung sarana yang memadai.

**Kata kunci** : Implementasi, Program, Informasi, Jaringan Pemasaran, Usaha Mikro Pada Era Revolusi Industri 4.0

**ABSTRACT**

*This research aims to find out how the Implementation of the Business Information Program and the Micro Business Marketing Network in the Industrial Revolution 4.0 in Jember Regency has been carried out properly. The research method uses a qualitative approach. The object of research is cooperative employees and micro businesses in Jember who work in the field of information and marketing networks. Data collection through interviews, observation, and documentation. The results of research on the Implementation of Information and Micro Marketing Network Business Programs in Jember Regency have been carried out in accordance with government policy. However, coaching efforts related to the program were not carried out optimally. Although supported by adequate facilities.*

**Keywords:** *Implementation, Programs, Information, Network Marketing, Micro Business in the industrial Revolution 4.0*

## I. PENDAHULUAN

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah suatu bagian dunia usaha nasional, yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategi dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Dinas KoKoperasi dan Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan pelaku UMKM dan masyarakat dengan serta ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. Koperasi dan usaha mikro memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pembentukan produk nasional, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan (Said dan Widjaja, 2007:1). Maka dengan Keberadaan suatu usaha kecil tidak dapat dipisahkan dari suatu pertumbuhan perekonomian secara daerah maupun nasional, karena dengan adanya satu usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Koperasi memiliki peran mengembangkan serta membangun kemampuan dan potensi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember adalah suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro serta tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah daerah. Adapun fungsi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember yaitu membantu dalam perumusan kebijaksanaan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati, pengembangan, pembinaan, pemasaran dan pelaksanaan kegiatan dibidang koperasi dan usaha mikro serta pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan umum, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas. Berdasarkan uraian diatas salah satu upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan umum dibidang koperasi dan usaha mikro yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet, dengan membangun sebuah situs untuk koperasi dan usaha mikro yang ada di kabupaten Jember. dengan menggunakan internet telah menjadi salah satu infrastruktur komunikasi yang termurah dan jangkauan penerimaan yang sangat luas, maka internet pun sering digunakan sebagai media alternatif untuk menjalankan usaha atau bisnis. Salah satu trend bisnis yang memanfaatkan internet adalah pembelian dan penjualan barang-barang dan jasa pada internet, atau suatu transaksi keuangan melalui internet antara pembeli dan penjual atau lebih dikenal dengan e-commerce. Dengan keunggulan internet yang dapat melakukan pelayanan 24 jam, akses yang mudah dan biaya yang relatif murah serta kemudahan-kemudahan lainnya, membuat semakin banyak



pembisnis yang merambah ke dalam e-commerce. Berdasarkan data yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, jumlah koperasi maupun usaha mikro yang ada di kabupaten Jember sudah semakin banyak. Namun dilihat dari pemasarannya masih terbatas dan belum bisa meluas ke beberapa daerah yang menyebabkan produk yang dihasilkan kurang dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan dibangunnya situs ini baik itu koperasi atau usaha mikro yang ada di kabupaten Jember dapat memanfaatkannya sebagai suatu media untuk mempromosikan perusahaan serta produk-produk yang dihasilkannya, agar produk-produk tersebut dapat dikenal lebih luas. Dan diharapkan dapat mempermudah konsumen yang akan membeli produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi atau usaha mikro, kecil dan menengah tanpa harus datang ke tempatnya secara langsung. dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai di sektor industri nasional maupun pada tingkat regional, perkembangan industri kecil di kabupaten Jember telah mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan. Hal ini tercermin dalam peningkatan jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi, nilai produksi, dan nilai tambah yang dihasilkan, serta semakin berkembangnya jenis dan produk industri kecil di daerah tersebut.

Sehubungan perkembangan industri saat ini, tercermin bahwa perkembangan home industri yang ada di Jember sangatlah baik. Salah satunya adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM) usaha ini tergolong usaha marginal, ditandai dengan penggunaan teknologi yang

relative sederhana, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Namun demikian di beberapa negara menunjukkan bahwa usaha mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa, serta mengatasi masalah kemiskinan. Usaha mikro bersama usaha kecil mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi. Indikasinya dapat dilihat dari peranan usaha mikro itu sendiri dan dapat dilihat dari kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumber daya. Industri Kecil dan Menengah selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern.

Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Koperasi dan Usaha mikro. Pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan adanya kenaikan tingkat income masyarakat atau individu sehingga tidak akan terdapat perbedaan atas target ekonomi yang akan diraih oleh negara-negara maju berkonsentrasi untuk meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang hanya terfokus pada upaya pengentasan kemiskinan atau usaha untuk mengejar keterbelakangan dan pertumbuhan. Pengelompokan usaha kecil menengah mengenai pengelompokan jenis usaha yang

meliputi industri dan usaha perdagangan. Industri kecil mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat perannya dalam pembangunan, industri kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling mengisi, saling memperkuat antara usaha kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program pembangunan dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember diselenggarakan dengan tujuan pembangunan koperasi dan usaha mikro yang tercantum pada Pola Dasar Pembangunan Daerah jember yang pada hakekatnya bagaimana mendorong Koperasi dan Usaha Mikro mampu berkiprah secara mandiri yang didukung penuh oleh masyarakat dengan menggali potensi yang dimiliki untuk dikelola secara optimal. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten jember mempunyai kontribusi yang nyata terhadap perekonomian di daerah yang pada gilirannya ditandai dengan meningkatnya tingkat pendapatan anggota dan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten jember diarahkan agar gerakan Koperasi dan usaha mikro lebih meningkat perannya, melalui konsolidasi semua aspek yang ada agar Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dapat tumbuh dan berkembang secara bertahap sesuai kemampuannya sendiri. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, maka kedudukan Koperasi dan Usaha Mikro perlu lebih diperkokoh dan dimantapkan secara

terus menerus melalui upaya dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan yang lebih intensif / terpadu secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah diarahkan agar dapat menjadi pusat pelayanan kegiatan perekonomian di daerah pedesaan yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari pembangunan.

Perkembangan UMKM di jember masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Secara mendasar, pelaku UMKM seringkali menghadapi permasalahan dalam mengembangkan usahanya, seperti terbatas kemampuan pengembangan pasar dan pemasaran, lemahnya dalam akses permodalan, kelemahan dalam bidang organisasi dan manajemen, keterbatasan membangun kemitraan usaha, dan iklim usaha yang kurang kondusif.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai bagaimanakah Implementasi Program Informasi dan Jaringan Pemasaran yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pada Era Revolusi Industri 4.0 Kabupaten Jember ?

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian Ini Untuk Mengetahui Implementasi Program Informasi Dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Kabupaten Jember.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang



bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Jember. Dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan dengan metode alamiah. Penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, keadaan dan tidak bermaksud menguji hipotesis. Dalam penelitian mengenai Implementasi Program Informasi Dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Implementasi Program Informasi Dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk Mencermati Program Informasi Dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember, tujuannya adalah untuk mempelajari secara intensif tentang proses pertanggung jawaban baik itu dari staff pegawai maupun pimpinan suatu Instansi Pemerintah.

### **Lokasi Penelitian**

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan judul dari proposal penelitian ini, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah daerah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

### **Sumber Data**

- a) Data ini bersumber dari responden langsung. Dalam prakteknya diperoleh dari wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap situasi lokasi penelitian. Data primer di peroleh langsung dari informan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro.
- b) Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung lokasi penelitian yaitu dokumen-dokumen data statistic, buku-buku, majalah, Koran dan keterangan lainnya. Data sekunder diperoleh dari sumber: dokumen dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang di teliti.

### **Metode Pengumpulan Data**

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

#### 1) Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan kepala bidang pemasaran serta petugas

terkait dengan program informasi dan jaringan pemasaran dalam rangka melaksanakan program Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Di Kabupaten Jember.

## 2) Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan. Dalam hal ini pengamatan terhadap Pelaksanaan Program Informasi Dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro Pada Era Revolusi Industri 4.0 serta perilaku UMKM yang menjalankan usahanya.

## 3) Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

## Metode Penentuan Informan

Penelitian ini untuk menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan memilih orang yang dianggap paling tahu (representatif) tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

## Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini.

- 1) Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- 2) Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data.
- 3) Penyajian data, serangkaian organisasi informasi yang memungkinkan untuk operasi penelitian. Penyajian data diperoleh oleh berbagai jenis, jaringan, hubungan interaksi, atau tabel.
- 4) Menggambar kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti perlu memahami dan menanggapi sesuatu yang telah diselidiki langsung di lapangan dengan mengatur pola arah dan sebab dan akibat.

## Keabsahan Data

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan untuk memastikan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi



merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Implementasi Program Informasi Dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Jember memfasilitasi pemasaran produk UMKM baik melalui media dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring) untuk membantu mempromosikan produk lokal di wilayah setempat. Pertumbuhan UMKM di Jember sangat luar biasa, namun terkadang mengalami kendala terkait dengan pemasaran, kepala bidang pemasaran mengatakan akan membantu promosi pemasaran produk UMKM secara online melalui laman [produkumkmjember.id](http://produkumkmjember.id), sehingga seluruh produk lokal Jember bisa dipasarkan di sana secara gratis dengan beberapa kategori produk seperti fashion, rumah tangga, minuman, makanan, kerajinan tangan, produk lainnya, aneka bahan dasar, dan aneka batik. Setiap para pelaku UMKM di Jember dapat masuk di dalam laman tersebut untuk mendaftarkan produknya tanpa dipungut biaya karena Dinas Koperasi yang mengelola laman tersebut. Untuk pemasaran

secara offline, pihaknya biasanya mengikutserakan beberapa produk UMKM dalam pameran baik level lokal, regional, maupun nasional, namun tentunya tidak semuanya ikut serta karena akan bergantian dan produk yang punya prospek yang cukup bagus akan diprioritaskan untuk pameran di even nasional.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember juga menjelaskan manfaat dari Program informasi dan jaringan pemasaran yaitu membantu pelaku usaha mikro menjadikan produk pelaku usaha bisa dipasarkan di sana secara gratis serta dapat memperluas pasaran dari produk tersebut, mengingat program informasi dan jaringan pemasaran usaha mikro melalui media dalam jaringan (daring) membantu pelaku usaha mikro sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan. Berkaitan dengan Pelaksanaan Program Informasi Dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro Pada Era Revolusi Industry 4.0 yang di lakukan oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember Bidang Pemasaran. Berikut penuturan yang disampaikan oleh Bidang Pemasaran sebagai berikut ini :

“Pelaksanaan Porgram yang di lakukan Bidang Pemasaran dalam rangka revolusi 4.0, yang semua berbasis digital maka kami berusaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Melalui penyediaan fasilitasi pemasaran berbasis online yaitu laman [produkumkmjember.id](http://produkumkmjember.id) yang berbasis website dan android, jadi pelaku UMKM di Jember dapat mempromosikan produknya di kanal tersebut agar lebih mudah dikenal masyarakat luas.(Wawancara 2 Desember 2019)

Berdasarkan Hasil wawancara diatas dengan Bidang Pemasaran, pihaknya telah melaksanakan program sesuai dengan aturan yang ada. Pihak Bidang sendiri telah menyediakan Pemasaran berbasis online. Hal ini dikatakan bahwa adanya aplikasi itu dapat membantu pelaku UMKM mempromosikan produk setiap UMKM di Kabupaten Jember. Yang dengan disediakan tersebut nantinya mempermudah agar di kenal masyarakat luas. Selanjutnya tugas Staf Bidang Pemasaran mengelola Aplikasi tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan mengenai program informasi dan jaringan pemasaran di Kabupaten Jember jika ditinjau dari model implementasi George Edward III adalah sebagai berikut ini :

### 1) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu variabel yang sangat penting agar tercapainya pelaksanaan kebijakan, kerana suatu komunikasi diperlukan agar pesan yang ingin disampaikan bisa mewujudkan pelaksanaan yang baik dan bisa diterima dengan penafsiran yang sama. Dalam pelaksanaan kebijakan program informasi dan jaringan pemasaran di Kabupaten Jember komunikasi sudah berajalan dengan baik dengan para pelaku UMKM. Sejauh ini komunikasi yang digunakan menggunakan surat, media sosial, koordinasi dan sosialisasi. Berkaitan dengan komunikasi antara Bidang Pemasaran dengan UMKM di Kawasan Kabupaten Jember,

khususnya Program Informasi dan Jaringan Pemasaran sendiri menuturkan sebagai Berikut wawancara dengan salah satu staf Bidang Pemasaran :

“Komunikasi dengan UMKM dilakukan melalui surat, telpon dan whatsapp. Dengan komunikasi menggunakan grup di whatsapp jadi kita koordinasikan lewat koordinatonya dari semua asosiasi UMKM. Sampai sejauh ini belum ada masalah terkait komunikasi dan masih berjalan dengan baik. Kendalanya memang belum semua kita undang kerana memang jumlah UMKM ribuan, Sedangkan jumlah SDM kita masih kurang dan terbatas. Bidang Pemasaran dalam memberikan informasi terkait dengan program bidang pemasaran banyak cara yang dilakukan, baik media online maupun offline, untuk media online melalui Web nya Dinas Koperasi, kalau secara offline di segala invent memberitahukan bahwa Bidang Pemasaran memiliki program jaringan pemasaran ataupun melalui banner dan poster.” ( Wawancara 9 januari 2020 )

Berdasarkan dari wawancara diatas maka Dinas Koperasi Bidang Pemasaran sudah melakukan komunikasi dengan UMKM menggunakan surat, melalui media sosial maupun media offline untuk koordinasi kepada pelaku UMKM. Sedangkan masih kedalanya belum semua pelaku UMKM dapat di undang kerana keterbatasan SDM yang di miliki Bidang Pemasaran., untuk Jumlah UMKM di Kabupaten Jember sudah ribuan.



Berkaitan dengan komunikasi di lakukan oleh bidang pemasaran berikut penuturan dari informan salah satu anggota UMKM Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Komunikasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bidang Pemasaran dengan UMKM di mediasi oleh koordinator. Kemudian setiap koordinator UMKM menginformasikan pada setiap anggota nya masing-masing. Setiap Koordinator menginformasikan lewat Group whatsapp komunitas, dan lewat rapat komunitas”. ( wawancara, 12 Februari 2020 )

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu selaku anggota UMKM bahwa komunikasi yang di lakukan Dinas Koperasi Bidang Pemasaran, melalui Koordinator masing-masing komunitas UMKM di Kabupaten Jember.

## **2) Sumber Daya**

Kajian tentang sumber daya di Perspektif teori Edward III, dapat peneliti tafsirkan meliputi 3 komponen atau unsur yaitu Sumber daya manusia (SDM), Sumber daya Keuangan dan sumber daya Sarana dan Prasarana. Berikut akan peneliti uraikan satu persatu.

### **a) Sumber daya Manusia**

Sumber daya Manusia merupakan potensi yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, salah satunya sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan

meningkatkan kinerja organisasi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember memiliki sumber daya manusia sebanyak 40 orang dengan semua berstatus sebagai PNS.

Tingkat golongan dari personil Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 30 orang (62%) dari seluruh staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan Koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Jember, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.

Tingkat pendidikan dari pegawai Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember yang terbanyak berpendidikan Sarjana (S1), yang rata-rata memegang jabatan struktural eselon IV. Jabatan struktural eselon IV pada suatu instansi merupakan supervisor atau baris pelaksana dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya tingkat pemahaman terhadap suatu perintah atau bentuk pendelegasian dan juga penguasaan teknis, baik pada tingkat konsep maupun aplikasi di lapangan. Dari Sumber daya manusia (SDM) di tingkat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sedangkan SDM yang menangani Program Informasi dan Jaringan Pemasaran, Bidang Pemasaran berjumlah 5 orang dari 40 Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.

### **b) Sumber daya Keuangan**

Sumber daya Keuangan juga mempengaruhi keberhasilan terhadap

suatu Pelaksanaan Program. Apabila sumber daya Keuangan terbatas maka kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi terhambat. Berikut Anggaran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember:

1. Alokasi Anggaran OPD

Keseluruhan anggaran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember tahun 2018 adalah sebesar Rp 9.231.159.414 yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung Rp.2.847.848.414

b. Belanja Langsung

Rp. 6.383.311.000

1) Belanja Pegawai Rp.

1.805.604.000

2) Belanja Barang/jasa Rp.

4.337.707.000

3) Belanja Modal Rp.

240.000.000

Proporsi Anggaran pada tahun 2018, Belanja Langsung sebesar 27,63 % dan Belanja Tidak Langsung sebesar 83,71%

a. Alokasi Anggaran Belanja langsung Keseluruhan anggaran belanja langsung perprogram dan kegiatan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jember tahun 2018 terdiri dari:

b. Alokasi Belanja Langsung Per Sasaran Pembangunan Untuk mengetahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran disajikan dalam tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir:

Berdasarkan tabel RKT 2018, dapat diuraikan proporsi alokasi anggaran belanja langsung sebagai berikut:

a. Untuk Sasaran Starategis I: Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro Didukung oleh :

1. Program Penciptaan Iklim

Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Dengan Anggaran Rp 1.041.220.000

2. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dengan Anggaran Rp 963.021.000

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dengan Anggaran Rp 1.160.827.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 3.165.068.500 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 11,32 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember

b.Untuk Sasaran Strategis II: Meningkatkan kualitas koperasi Didukung oleh :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dengan Anggaran Rp 1.189.210.000

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp 1.189.210.000 yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 5,01 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember.

Namun penjelasan tentang Sumber Daya Keuangan yang terkait dengan Program Informasi dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro tidak peneliti dapatkan. Dugaan peneliti, data tersebut merupakan data yang di rahasiakan. Ketika peneliti menanyakan data tersebut, Bidang Pemasaran melarang peneliti untuk mencantumkan, peneliti adanya data tentang sumber daya keuangan dari Laporan Kinerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro



Kabupaten Jember dan prosedur dari Renstra.

Penjelasan lain, peneliti dapatkan dari narasumber berinisial S, menyatakan banyak program atau kegiatan yang terkait anggaran tidak terserap atau terlaksanakan secara maksimal. Berdasarkan penjelasan informan S, masalah operasional di bidang pemasaran menurut peneliti, kurang berjalan secara maksimal.

Sumber daya Peralatan atau sarana dan prasarana ini juga menunjang terhadap pelaksanaan dari suatu kebijakan.

### 3) Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang di gunakan untuk Program Informasi Dan Jaringan Pemasaran sebagai berikut:

Sarana Dan Prasarana Di Gunakan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bidang Pemasaran Kabupaten Jember

No	Nama Alat	Jumlah
1	Komputer	3
2	Kamera	1
3	Wifi	1

Dari tabel di atas yang terkait dengan operasional Bidang pemasaran meliputi : Komputer, kamera dan wifi. Selain Sumber Daya Manusia yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah pelaksanaan kebijakan, sumber daya anggaran juga menjadi faktor penentunya. Apabila sumber daya anggaran terbatas maka kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi terhambat. Selain dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, faktor selanjutnya yakni sumber daya peralatan. Sumber daya

peralatan ini juga menunjang terhadap pelaksanaan dari suatu kebijakan. Berikut wawancara dengan salah satu staf Bidang Pemasaran :

“kalau terkait SDM Bidang Pemasaran sendiri sudah cukup memadai dari segi kualitas. Namun untuk kuantitas perlu ditambah lagi, soalnya staf dibidang pemasaran hanya 4 orang kalau ditambah dengan Kepala Bidang 1 orang. Sedangkan untuk anggaran dan peralatannya sendiri sudah cukup, misalnya kamera, internet dan Komputer ada untuk mengelola Aplikasi online”. (Wawancara 9 januari 2020 )

Berdasarkan dari wawancara diatas bahwa untuk SDM Bidang Pemasaran sendiri sudah cukup dari segi kualitasnya, Namun untuk kendalanya masih kurangnya Kuantitas SDM, Khususnya Bidang Pemasaran perlu ditambah. Sedangkan dari segi pengetahuan perlu di tambah staf lulusan TI yang masih belum ada di bidang pemasaran, Sedangkan anggaran dan peralatan sudah mencukupi.

### 3) Disposisi

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan atau respon petugas apabila ada keluhan dari masyarakat yakni dengan memberikan keterangan atau penjelasan sebagaimana mestinya yang berkaitan dengan jenis keluhannya. Disposisi sendiri bisa diartikan sebagai suatu bentuk komitmen dari pelaksana atau implementor dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Pemerintah sendiri dalam upaya menjalankan kebijakan sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan biasanya tertuang dalam dokumen seperti halnya rencana strategis ataupun rencana kerja. Jika dilihat dari staf bidang pemasaran terkait aplikasi online yang di buat oleh bidang pemasaran maka petugas dengan sigap dalam menangani keluhan pelaku UMKM, misalnya saja ketika ada keluhan Pelaku UMKM kesulitan registrasi atau mengisi biodata maka staf dinas bidang pemasaran langsung membantu untuk registrasi maupun mengisi biodata. Setiap melaksanakan program bidang pemasaran selalu dapat antusias dari pelaku UMKM dalam melakukan kegiatan- kegiatan, misalnya bimbingan teknis maupun pelatihan yang terkait wirausaha dan ikut serta dalam invent – invent yang di adakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Jember.

Merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2019 dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Dalam lampiran Rencana Strategis tersebut salah satu tujuannya yakni untuk Fasilitasi kemudahan formasi Usaha kecil menengah. Dari tujuan tersebut dimana sasarannya untuk meningkatkan jumlah Usaha Mikro yang di fasilitasi untuk Pembuatan surat keterangan usaha (SKU) sebagaimana tercantum dalam RPJM. Dalam RPJM tersebut bahwa suatu mewujudkan pemenuhan dasar yang beradil, Dengan adanya kebijakan tersebut yang tercantum dalam Rencana Strategis dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Berdasarkan rencana aksi Tahun 2019 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro program yang di laksanakan Bidang Pemasaran. Program Dinas Koperasi

Dan Usaha Mikro Bidang Pemasaran memiliki rencana Kinerja tahun (RKT) 2019, hal ini disposisi kan kepada koordinator- koordinator UMKM di Kabupaten Jember. Salah satu contoh yang peneliti pada saat peneliti mendapatkan tentang Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU). Program ini di sampaikan dan disposisi kepada UMKM, kemudian dengan koordinator disosisikan kepada anggota. Berikut adalah persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Usaha:

1. Surat pengantar RT/RW yang sudah distempel lengkap (sesuai lokasi usaha berada, bukan sesuai domisili di KTP pemohon);
2. Formulir Pernyataan Surat Keterangan Usaha yang distempel oleh perangkat RT/RW, dan ditanda tangani di atas materai 6000;
3. Fotokopi KTP/KK pemohon;
4. Fotokopi Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir (jika tempat usaha milik pribadi), atau bukti sewa (apabila tempat usahanya menyewa);
5. Foto usaha (tampak depan lokasi usaha dan dagangannya);
6. Untuk usaha kontrakan dilampirkan fotocopy bukti kepemilikan lahan (nama harus sesuai dengan nama pemohon);

Untuk usaha bengkel & gas, dilampirkan formulir tidak keberatan dari lingkungan/tetangga sekitar, (formulir harus diisi dan ditandatangani 4 orang tetangga disertai fotokopi KTP masing-masing). Adapun persyaratan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha kecil yang sudah memenuhi syarat adalah sebagai berikut :

1. KTP pemohon dan pasangan (bagi yang sudah menikah);



2. Dokumen keluarga baik berupa kartu keluarga maupun surat nikah;
3. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari pejabat yang berwenang;
4. Surat legalitas dan ijin usaha (jika ada);
5. Fotokopi legalitas agunan yang akan dijadikan jaminan; dan
6. Dokumen lain yang diperlukan.

Selain disposisi (komitmen) dari pemerintah terkait mengenai pelaksanaan Program, hal lain yang mempengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan bisa dilihat dari penerimaan atau respon dari pelaku UMKM baik sebagai penerima kebijakan maupun pelaksana dari program tersebut. Bentuk penerimaan dari pelaku UMKM terhadap sebuah kebijakanpun dilihat dari banyaknya pelaku UKM turut serta dalam pelaksanaan kebijakan Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU). Berikut ini wawancara salah satu informasi pelaku UMKM sebagai berikut penuturannya :

“Kalau untuk Program tentang Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) saya terima-terima saja mas. Lagian pula dengan itu sangat membantu pelaku UMKM mudah untuk mengajukan pinjaman ke Bank atau pemilik modal lainnya, untuk kredit peminjaman modal usaha mikro. Dengan Surat Keterangan Usaha menjadikan persyaratan bagi pelaku UMKM yang ingin mengakses dana untuk Kredit Usaha Mikro di bank termasuk di bank Jatim. Pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU). tidak di pungut biaya sama sekali atau gratis.

( wawancara, 12 Februari 2020 d)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Iusia Irawati selaku

anggota UMKM, Dengan usaha UD. Matrix Jaya Aneka Olahan bahwa terkait dengan kebijakan mengenai Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang di lakukan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bidang Pemasaran Kabupaten Jember. Bidang Pemasaran memfasilitasi dalam pembuatan surat keterangan Usaha (SKU).

#### 4) Struktur Birokrasi

Implementasi suatu kebijakan, struktur birokrasi memiliki peranan yang penting. Dalam struktur birokrasi aspek yang penting dari setiap organisasi yakni dengan adanya SOP. Dimana untuk administrasinya sendiri berada di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Apabila dilihat dari struktur organisasi, dinas koperasi dan usaha mikro Kabupaten Jember telah memiliki SOP yang mana menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain itu juga Struktur Birokrasi atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Informasi Dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro. *Standard Operating Procedures* (SOP), untuk Pelaksanaan Program Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bidang Pemasaran Kabupaten Jember beracuan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten jember.

Berikut wawancara dengan salah satu staf bidang pemasaran :

“SOP dalam Pelaksanaan Program Informasi dan jaringan Pemasaran Usaha Mikro di laksana oleh seluruh komponen

Aparatur yang ada bidang pemasaran mulai dari kepala bidang pemasaran, kepala seksi pemasaran dan staf bidang pemasaran. Untuk organisasi di luar dari dinas koperasi dan usaha mikro ialah seluruh sasaran terlibat dengan program aplikasi online itu tentunya produk- produk dari pelaku UMKM, itu sendiri yang memiliki produk, para pelaku UMKM yang nantinya akan mengakses website dan aplikasi berbasis android yang di buat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk dapat memasarkan produknya. Dalam bidang pemasaran sendiri memiliki SOP bagaimana UMKM tersebut dapat upload produknya harus registrasi dan mengisi biodata yang ada di aplikasi [produkumkmjember.id](http://produkumkmjember.id) itu kalau SOP secara online, sedangkan secara offline pelaku UMKM harus membawanya ke Dinas koperasi dan usaha Mikro di bidang pemasaran. Sudah sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) nya.

Berdasarkan dari wawancara diatas maka Dinas Koperasi Bidang Pemasaran sudah melakukan SOP dengan para pelaku UMKM, sedangkan Untuk organisasi di luar dari dinas koperasi dan usaha mikro ialah seluruh sasaran terlibat dengan program aplikasi online itu tentunya produk- produk dari pelaku UMKM, itu sendiri yang memiliki produk, para pelaku UMKM yang nantinya akan mengakses website dan aplikasi berbasis android yang di buat oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Sudah sesuai

Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) nya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut yang didapatkan sesuai dari hasil penelitian mengenai Implementasi Program Informasi dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro Di Kabupaten Jember telah di Implementasi Sesuai dengan kebijakan pemerintah. Adapun buktinya dapat dilihat pada web atau aplikasi android yang secara khusus di buat oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bidang Pemasaran, operasional dari web ini mendapatkan dukungan dari variabel-variabel berikut ini:

1. Komunikasi, dengan UMKM di mediasi oleh koordinator masing-masing, sering kali berjalan kurang efektif. yang memiliki oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bidang Pemasaran, usaha pembinaan terkait program tak terlaksana secara maksimal.
2. Sumber daya, meliputi :
  - a) Sumber daya manusia (SDM) berjumlah 40 orang PNS dengan berstatus pendidikan yang memenuhi syarat. yang menangani Program informasi dan jaringan pemasaran berjumlah 5 orang yang masih perlu di tambah kuantitasnya.
  - b) Sumber daya keuangan yang di miliki oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bidang Pemasaran masih banyak program atau kegiatan yang terkait Sumber daya Keuangan/



anggaran namun tidak terserap atau tak laksana secara maksimal.

- c) Sumber daya sarana dan prasaranan sudah memadai.
3. Disposisi, yaitu komitmen dari stakeholder sudah berjalan namun belum maksimal cara pelaksanaannya.
4. Struktur birokrasi, untuk pelaksanaan program Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Bidang Pemasaran Kabupaten Jember beracuan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja dinas koperasi dan usaha mikro kabupaten jember. Sudah sesuai Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) nya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka teori Edward III tidak sepenuhnya mampu menggambarkan situasi di lapangan. Pelaksanaan suatu program menurut Edward III harus mendapatkan dukungan dari Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur brokrasi. Tetapi fenomenan di lapangan menunjukan bahwa ketersediaan Sumber daya keuangan/ anggaran menjadi kendala bagi maksimalisasi dari tujuan. Selain itu kendala yang lain ada pada Model komunikasi antara UMKM dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bidang pemasaran terkait dengan perubahan-perubahan produk- produk mereka yang harus di sampaikan melalui koordinator. Model ini menghambat tersampainya produk terbaru UMKM ke publik.

## Saran

Sehubungan pelaksanaan kebijakan mengenai Program Informasi dan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro yang di lakukan Bidang Pemasaran tentunya harus ditingkatkan lagi seperti komunikasi Bidang Pemasaran dengan UMKM, Harus memilik data base agar memudahkan komunikasi dengan seluruh anggota UMKM. dan Sumber daya Manusia (SDM) Bidang Pemasaran perlu di tambahkan lagi dan memiliki lulusan TI. Supaya stakeholder terkait agar targetnya bisa terpenuhi. Sinergi dari dinas koperasi dan usaha mikro terkait perlu dilakukan secara bersama- sama baik Pemerintah maupun pelaku UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Arikunto S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetakan ke-11. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm: 67, 225.

Budi Winarno, Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta. 2007

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Philip Kotler dan G. Amstrong, Prinsip-Prinsip Pemasaran, (Jakarta; Erlangga, 1997)

Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga

Nugroho, Riant D, 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta, PT. Alex Media Komputindo

Nawawi dan Martini. 1992. Instrumen Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV

William ndunn (2002). Analisis kebijakan publik edisi ke-2. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta

### Journal online

A.A Gde Satia Utama (2016). Desain marketing information systems pada usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di des ataman sari kabupaten banyuwangi, (Isbn 978-602-60569-2-4).

Ahmad haidar mirza (2019). Evaluasi system informasi usaha kecil dan menengah (umk) kota Palembang, volume 6 nomer 4 tahun 2019,p-issn 2355-7699, e-issn 2528-6579

Basu Swastha, Manajemen Pemasaran Modern,(Yogyakarta: Liberty, 2005) hal.

Dian Kharisma Putri (2017) Implementasi Strategi Dinas Koperasi Dan Umkm Dalam Meningkatkan Kualitas Kelembangaan Koperasi yang tangguh, Mandiri, dan Maju di kota Bandar Lampung ( studi pada Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil Menengah

Daviana fedland (2016). Implementasi program fasilitas pengembangan usaha mikro melalui kegiatan kemas di dinas koperasi dn umkm kabupaten kubu raya.

Endang Purwaningsih, Muslikh dan Suhaeri (2019) Peningkatan Kualitas Produk Umkm Kampung Wisata Bisnis Tegal Waru Dalam Upaya Komersialisasi Produk Berdaya Saing Dan Berbasis Informasi Teknologi



Yoga Satria Siaga, Jani Januar ,dan  
Ati Kusmiati ( 2018)  
Penerapan Dan Pemanfaatan  
Media Online Dalam  
Pengembangan System  
Pemasaran Umkm (   
Argroindustri) Di Kabupaten  
Jember.

**Web**

[www.jemberkab.go.id/implementasi-sakip-pemerintah-daerahkabupaten-jember-tahun-2019/](http://www.jemberkab.go.id/implementasi-sakip-pemerintah-daerahkabupaten-jember-tahun-2019/) di akses Pada tanggal 23 desember 2019

[www.uppkhkabjember.blogspot.co.id/2013/07/pendamping-pkh.html](http://www.uppkhkabjember.blogspot.co.id/2013/07/pendamping-pkh.html)di akses pada tanggal 5 Februari 2020

(<http://raghibnuruddin217.blogspot.com/> di akses 23 februari 2020)

**Dokumen-dokumen:**

Peraturan Bupati Jember Nomor 43  
Tahun 2016

Peraturan Menteri Koperasi Dan  
Usaha Kecil Dan Menengah  
Republik Indonesia Nomor 02  
Tahun 2019

